

**POS-SALAFISME:
Transformasi Politik Salafisme Mesir Pasca Arab Spring**



Oleh:

Irkham Shofwan

NIM: 1620011010

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelas Studi Master of Arts (M.A.)**

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham Shofwan Lc.

NIM : 1620011010

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian-karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Nopember 2018



Irham Shofwan Lc.
NIM: 1620011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikham Shofwan Lc.

NIM : 1620011010

Jerjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Nopember 2018



Ikham Shofwan Lc.
NIM: 1620011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul: Pos-Salafisme; Transformasi Politik Salafisme Mesir Pasca Arab
Spring

Nama : Irkham Shofwan Lc.

NIM : 1620011010

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Tanggal ujian : 21 November 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister of Arts (MA).

Yogyakarta, 26 November 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

**PERSetujuan TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : POS-SALAFISME: Transformasi Politik Salafisme Mesir Pasca Arab Spring
Nama : Irkham Shofwan
NIM : 1620011010
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah
telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., M.A. (



a.p. Prop. Karim

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Ibnu Burdah, M.A. (



Penguji : Prof. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. (



diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 2018

Waktu : 01.00 - 11.00 WIB.

Nilai Tesis : 92/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan~~ Memuaskan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

POS-SALAFISME: Transformasi Politik Salafisme Mesir Pasca Arab Spring

yang ditulis oleh:

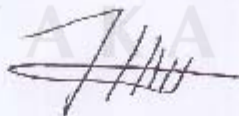
Nama : Irkham Shofwan La.
NIM : 1620011010
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (MA).

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Nopember 2018

Pembimbing,



Dr. Irma Burdah, S.Ag., MA.
NIP. 19761203 200003 1 001

ABSTRAK

Revolusi 25 Januari tidak hanya menjadi angin kebebasan bagi rakyat Mesir. Ia bahkan merupakan momentum persaingan dan kontestasi bagi kelompok-kelompok Revolusi untuk berpolitik praktis. Penelitian ini mengkaji kelompok Salafisme Apolitik (Puritan) di Mesir yang menjadi aktor baru dalam perpolitikan demokratis setelah lengsernya Husni Mubarak. Sebagai kelompok yang mengadopsi doktrin-doktrin anti politik dalam ideologi keagamaan, kemunculan Salafisme dalam panggung politik menjadi perhatian besar.

Tesis ini menguraikan proses-proses transformasi yang terjadi secara cepat pada kelompok Salafisme Mesir. Mereka mendapatkan pembentukan pergerakan politiknya pada dua fase. Pertama, ketika memutuskan untuk membentuk partai politik, dimana Salafisme justru menampakkan obsesinya yang besar dalam panggung politik. Kesuksesan di Perlemen menjadi salah satu dampak positif dari obsesi tersebut. Kedua, ketika krisis politik yang semakin tajam pada saat Muhammad Mursi menjabat menjadi Presiden baru. Momentum ini berakhir dengan kembalinya nuansa rezim lama di tangan Abd Al-Fattah As-Sisi sebagai presiden baru. Pada momentum ini, Salafisme justru semakin bertahan bersama rezim baru.

Transformasi apolitik Salafisme kepada politik praktis memang dibantu oleh terbukanya kesempatan politik saat itu. Ia juga disokong dengan loyalitas yang sangat kuat diantara massa Salafisme. Obsesi untuk menegakkan *syar'ah* juga disebut-sebut sebagai semangat yang menjadi latarbelakang. Namun ada satu lagi faktor kunci yang menjadi kompas penentu bagi seluruh arah pilihan politiknya. Dalam tesis ini, penulis berusaha menguatkan adanya diskursus *masalah* dan *mafsadah* yang oleh Salafisme tidak hanya digunakan sebagai landasan wacana. Diskursus tersebut juga menjadi modal ideologis untuk melakukan mobilisasi dan memantapkan massa Salafisme untuk menjadi mencuat di panggung politik yang demokratis. Melalui diskursus tersebut, transformasi ini menjadi contoh pertama dari Salafisme Apolitik (Puritan) sepanjang keberadaanya.

Kata kunci: *Transformasi Politik, Salafisme Mesir, Revolusi Januari, Arab Spring*

MOTTO

Ngaji adalah sebaik-baik jalan hidup dan beragama (*thariqah*)

- Abah Yai Masruri Abdul Mughni -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Keempat orang tua; mereka senantiasa bersabar mendukung, mendoakan, mendampingi.
2. Umi Sangidah; istri tercinta, dan Haitsam Atar Muhammad; putra tersayang. Keduanya tak pernah lelah memanjakan mata, membangkitkan rindu, dan menguatkan cita-cita.
3. Para guru, khususnya di kelas Kajian Timur Tengah kami.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan tutur syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta Salam turut penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud rasa cinta dan harapan akan syafa'atnya kelak.

Penulis berbahagia dengan selesainya tesis yang berjudul “Pos-Salafisme: Transformasi Politik Salafisme Mesir Pasca Arab Spring”. Kebahagiaan ini karena penulisan tesis dilakukan dengan kerja yang tidak ringan. Ada proses internal dan eksternal yang saling berimbang. Disamping itu ada cara ketat yang harus dipenuhi berdasarkan ilmu penulisan dan ilmu yang menjadi konsentrasi yang penulis dapatkan dari para Dosen dan Pembimbing selama ini.

Maka salah satu wujud rasa bahagia ini, penulis ingin mengukirkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana; Ibu Ro'fah, BSW., Ph.D.; dan Dr. Ulinuha, M. Hum., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies; dan Bapak Dr. Ibnu Burdah, MA., yang tidak hanya sebagai pembimbing kelas kami semua dan Koordinator pada Konsentrasi Kajian Timur Tengah, namun juga Dosen Pembimbing Tesis ini. Melalui bimbingan dan arahan dari mereka semua, khususnya dari beliau Dosen Pembimbing, penulis akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keempat orang tua, yang telah dengan sabar dan konsisten mendoakan pada setiap waktu dan merestui penulis menyelesaikan studi ini. Mereka bahkan selalu sabar dalam menghadapi keluh dan kesah dari penulis ketika membutuhkan motivasi. Demikian juga kepada Umi dan Atar, yang selalu sabar menunggu, juga membiarkan penulis menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya.

Kepada teman-teman kelas yang dari awal sudah terasa sebagai perkumpulan seperjuangan. Penulis tidak hanya menjalin persahabatan dengan mereka, namun juga

belajar hal-hal baru kepada mereka. Selain itu semua, aktivitas kami semua di luar kelas juga banyak yang mengesankan. Terhadap kebaikan dan ketulusan teman-teman semua, penulis menyampaikan terimakasih banyak. Meskipun penulis merupakan anggota kelas yang paling jarang tampak ketika berkumpul di luar kelas, namun banyak hal yang penulis simpan dalam ingatan. Penulis sangat berharap MESSIA yang telah dirintis bisa diteruskan sebagai karya yang bermanfaat, dan yang paling penting adalah: mempersatukan kelas kita lagi di masa depan. Selain ucapan terimakasih yang tulus ini, penulis juga menyampaikan permohonan maaf bila selama menjalani proses perkuliahan, dan terutama penulisan tesis ini, ada banyak kekeliruan dan interaksi yang kurang baik.

Kemudian penulis meyakini bahwa karya ini masih jauh dari sifat sempurna. Tentu tidak ada karya manusia yang sempurna, dan ide-idenya selalu berubah dan berkembang. Maka saran dan kritik dari berbagai pihak penulis sambut dengan senang hati. Namun penulis pun berharap, semoga karya ini mengandung manfaat, khususnya untuk lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk diri penulis.

Akhirnya, penulis pun menyampaikan harapan yang besar semoga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi institusi pendidikan yang tetap berprestasi, berjaya, dan semakin luas menebarkan pengaruh positifnya bagi masyarakat sekitar, dan terutama bagi alam pendidikan bangsa Indonesia.

Yogyakarta, 26 Nopember 2018

Irkham Shofwan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: SALAFISME MESIR: SEJARAH DAN IDEOLOGI	27
A. Asal Usul Salafisme Mesir	27
1. Makna istilah Salafisme.....	27

2. Mesir dan Kontestasi Salafisme	31
3. Mesir dan Fragmentasi Salafisme.....	37
4. Salafisme Apolitik di Mesir.....	40
B. Doktrin Teososiologi Salafisme	44
1. Doktrin <i>Al-Wala dan Al-Bara</i>	46
2. Penafsiran terhadap Hadis Perpecahan Umat (<i>iftiraq al-ummah</i>)	50
C. Doktrin Apolitik Salafisme	59
1. Urgensi Pemerintahan (Mengangkat Penguasa).....	61
2. Urgensi Kepatuhan Terhadap Penguasa	66
3. Demokrasi dan Nuansa Politik di Parlemen	70
BAB III: POLITIK SALAFISME DI MESIR PASCA ARAB SPRING	78
A. Pembentukan Partai Politik	81
B. Pembentukan Koalisi Politik	94
C. Partisipasi Pemilihan Umum.....	95
D. Pergulatan Pilihan Politik Salafisme	106
BAB IV: REVOLUSI JANUARI DAN TRANSFORMASI	
SALAFISME MESIR.....	113
A. Pragmatisme Politik	113
B. Popularitas Islamis.....	118
C. Transformasi Salafisme dan Konteks Pos-Islamisme	121

BAB V: PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap politik Salafisme Mesir yang berbeda antara sebelum Revolusi 25 Januari dengan sesudahnya, menurut Stephan Lacroix,¹ dinilai sebagai sikap politik pragmatis. Sikap pragmatis ini digambarkan oleh Muhammad Fathi Hishan bahwa Salafisme Mesir berpartisipasi dalam politik, dengan mendirikan partai, bukan karena memandang pentingnya berpolitik. Partisipasi mereka justru disebabkan ada tujuan lain yang berorientasi kepada kepentingan kelompok Salafi sendiri.²

Salafisme Mesir termasuk kelompok Islam yang penting dan berpengaruh di wilayah Arab. Ia muncul dan berkembang sejak masa kebangkitan Arab. Al-Jam'iyah As-Syar'iyah adalah organisasi Salafisme Mesir tertua di Mesir, telah berdiri sejak Desember 1912.³ Dengan fokus gerakannya pada aspek-aspek sosial, Salafisme Mesir dalam waktu satu abad berkembang pesat; berhasil mendirikan 350 cabang dan mengelola sekitar 38 sekolah yang tersebar di seantero negeri. Ia juga mengelola panti asuhan, rumah sakit, dan tempat-tempat pendidikan agama bagi masyarakat dalam jumlah banyak. Lembaga Salafisme Mesir lainnya adalah

¹ Stephan Lacroix, *Miṣr: As-Salafīyyūn Al-Bragmatīyyūn*, <http://www.carnegie-mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984> (diakses 15 Desember 2017).

² Sari Hanafi, "As-Salafīyah wa As-Salafīyyūn Al-Judud", *Majalah Omran*, Vol. 19 (2017), 207.

³ Ammar Ahmad Fayid, "Assalafīyyūn min Syar'īyah Fatwā ilā Syar'īyah Intikhāb", ed. Basyir Musa Nafi' dkk., *Ad-Zāhirah As-Salafīyah: Atta'addudīyah At-Tanzī miyyah wa As-Siyāsāt* (Qatar: Markaz Al-Jazeera li Ad-Dirasat, 2014), 51.

Jam'iyah Ansharus Sunnah Al-Muhammadiyah.⁴ Lembaga ini secara rutin menerbitkan majalah At-Tauhid sebanyak 100.000 eksemplar setiap bulannya, juga mengelola sekitar 30 sekolah untuk calon juru dakwah (*dâ'i*) dan sekolah terbuka. Ia juga memiliki lembaga pendidikan agama bernama Markaz Ta'lim Al-Afariqah yang khusus bagi warga Afrika⁵.

Sebagai kelompok Islam yang memegang teguh semboyan “berhukum kepada hukum Allah dan Rasul-Nya”, Salafisme Mesir melarang dirinya partisipasi dalam kegiatan politik praktis, termasuk dalam membentuk partai. Kelompok ini tidak memiliki lembaga yang bergerak dalam bidang politik praktis, tidak berafiliasi dengan pergerakan politik, baik perorangan maupun organisasi. Para figur Salafisme yang Mesir – dijuluki *Syeikh* – dari masa lalu hingga kini kebanyakan berasal dari latarbelakang pendidikan Islam.

Larangan berpolitik praktis telah menjadi doktrin umum di kalangan Salafisme Mesir. Sebagai kelompok yang mengusung semboyan pemurnian agama, dan kembali kepada Al-Qur'ân dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sumber yang prinsip, mereka memandang demokrasi sebagai sistem yang haram dan *kufir*. Namun meski mereka hidup dan berkembang ditengah sistem demokrasi, mereka tetap melarang perlawanan terhadap pemerintah. Terhadap pemerintahan Husni Mubarak, mereka menganggapnya sah dan legal dengan alasan pemerintahan tersebut menggunakan *syar'ah* dalam landasan Undang-undangnya. Dalam aspek tersebut, ideologi Salafisme Mesir adalah apolitik.

⁴ Berdiri pada tahun 1926.

⁵ Fayid, 51.

Bahkan ketika protes 25 Januari pecah, kelompok Salafisme mengutuk aksi protes tersebut, dan tetap membela pemerintahan yang sedang berjalan.

Antara Ikhwanul Muslimin dengan Salafisme Mesir sebenarnya ada *gap* ideologis dan prinsip gerakan. Semenjak Ikhwanul Muslimin menetapkan dirinya sebagai kelompok politik di masa Husni Mubarak, Ikhwanul Muslimin menjadi kelompok yang dikritik habis oleh Salafisme. Dalam pandangan mereka, strategi Ikhwanul Muslimin dalam jalur politik adalah *absurd* karena dalam membentuk partai (*hizbiyyah*), mereka harus mengalahkan prinsip-prinsip agama. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam politik, Ikhwanul Muslimin telah melakukan pecah belah terhadap gerakan Islam. Terlebih ketika Ikhwanul Muslimin mengalami kegagalan politik setelah mengalami represi, kenyataan ini menjadi semacam akhir cerita bagi kelompok Salafisme untuk melemparkan kritik bertubi-tubi kepada Ikhwanul Muslimin.⁶

Namun semenjak Husni Mubarak dilengserkan dari jabatan Presiden, kelompok Salafisme muncul ke permukaan politik. Mereka muncul secara bertahap relatif cepat bersama perkembangan protes 25 Januari. Pada gilirannya, mereka mendirikan partai politik hingga enam partai. Satu partai diantaranya berhasil menduduki posisi kedua di Perlemen, dengan perolehan kursi 25%. Sejak saat itu, Salafisme Mesir mengalami perubahan yang mencuat.

Benih-benih tentang pandangan bolehnya berpolitik dari Salafisme Mesir sebenarnya telah muncul sejak tahun delapan puluhan, dimana Faksi Salafisme Ad-Da'wah As-Salafiyyah berdiri saat itu dan sebagai yang pertamakali

⁶ Mohammad M. Hafez dan Quintan Wiktorowicz, "*Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan dalam Gerakan Islam di Mesir*," Ed: Quintan Wiktorowicz, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012).

menyuarakan kebolehan ikut berpolitik. Padahal ideologi Faksi Ad-Da'wah As-Salafiyyah tidak jauh berbeda dari ideologi politik Salafisme pada umumnya; menolak demokrasi dan menganggapnya sebagai *kufir*. Menerima demokrasi sama saja dengan mengorbankan akidah karena ia berarti juga menerima pemimpin yang tak bertuhan atau kafir. Akan tetapi mereka tidak menolak berpartisipasi dalam perpolitikan dan pemilihan umum sebagai langkah awal.⁷

Jauh setelah itu, pandangan kebolehan berpolitik dikonstruksi kembali oleh Hafs; faksi Salafisme yang didirikan oleh Syeikh Ridha As-Samadi pada tahun 2005. Pandangan ideologis yang diusung oleh faksi ini sebenarnya adalah reformasi (*al-iṣlah*) yang menyeluruh, termasuk dalam aspek politik, dengan catatan berdasarkan Al-Qur'ān dan As-Sunnah. As-Samadi melangkah lebih jauh dengan menyerukan agar segera ada konstruksi konsensus Salafisme yang melegitimasi bahwa berpolitik menjadi rasional bagi Salafisme Mesir, baik semua lapisan kelompoknya maupun level golongannya, agar pilihan berpolitik menjadi sesuai dengan *syarī'ah*.⁸ Faksi Salafisme lain, Al-Madkhaliyyah, bahkan tidak hanya membolehkan berpolitik. Dengan berdasarkan kepada keharusan taat

⁷ Kelompok ini disebut juga sebagai *Ad-Da'wah As-Salafiyyah As-Sakandariyyah*. Ia bermula dari pengajian kecil di masjid Umar ibn Al-Khatthab di Alexandria (Al-Iskandariyyah atau As-Sakandariyyah) yang disampaikan oleh Muhammad Ismail Al-Muqoddam pada tahun tujuh puluhan. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang terpengaruh pandangan agamanya oleh para *syaiikh* Jam'iyyah Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyah dan para Ulama Salafi Saudi Arabia. Seiring pengajian ini berkembang menjadi gerakan kelompok para anggotanya dan bahkan beraktivitas didalam kampus Universitas Alexandria, bersaing pula dengan Ikhwanul Muslimin disana, mereka pun kemudian menyepakati untuk menamai pergerakan mereka sebagai Al-Madrasah As-Salafiyyah, dengan ketua terpilihnya bernama Muhammad Abd Al-Fattah (Abu Idris). Kemudian gerakan mereka berkembang hingga ke seluruh kota Alexandria, dan pada tahun delapan puluhan berubah nama menjadi *Ad-Da'watul As-Salafiyyah*. Fayid, 56-57.

⁸ Kelompok ini sebenarnya bernama *Al-Harakah As-Salafiyyah Al-Iṣlāhiyyah*. Nama Hafs sendiri merupakan julukan untuk As-Samadi. Reformasi yang dibangun berlandaskan kepada ajaran *Amar Ma'rūf* dan *Nahi Munkar*. Bagi mereka, pandangan semacam ini dimaksudkan untuk membangkitkan gerakan umat Islam, sehingga memerlukan suatu rasionalitas baru untuk menggerakkan kebangkitan. Fayid, 58.

kepada pemimpin yang sedang berkuasa, Syekh Mahmud Amir, salah satu tokohnya, bahkan menyatakan *bai'ât* (janji setia) untuk pemerintahan Husni Mubarak, dan menganggapnya sebagai *Amîr Al-Mu'minîn* (Pemimpin orang-orang beriman).⁹

Namun demikian, mayoritas Salafisme di masa rezim, secara praktis, belum menentukan pilihan untuk berpolitik praktis. Mereka seperti kelompok masyarakat lainnya yang menjadi target kampanye dan ajakan politik dari partai yang ada.¹⁰

Pada nuansa politik yang sedang berubah besar-besaran, Salafisme menjadi pemain baru dalam perpolitikan praktis Mesir. Beberapa hari menjelang lengsernya Mubarak, situasi protes yang semakin membesar dan menimbulkan korban jiwa mulai mengubah arah pandangan para figur Salafisme. Sebagian bahkan ikut turun ke medan protes bersama rakyat. Hal ini meruntuhkan apa yang selama ini menjadi ideologi yang prinsip. Bahkan massa kelompok Hafs yang mengikuti protes di *Tahrir Square* menggunakan legitimasi agama bahwa penguasa saat itu tidak pada jalur *syar'îh*, oleh karenanya harus ditumbangkan.¹¹

Tumbangya Husni Mubarak menjadi sebuah momentum keterbukaan politik bagi Mesir. Kelompok-kelompok revolusi yang merasa kehilangan musuh bersama, akhirnya terlibat kontestasi untuk meraih simpati dari rakyat Mesir,

⁹ Fayid, 60.

¹⁰ Ahmad Zaghul Syalathah, "*Mustaqbal At-Taḥawwulât Dâ khila At-Tayyâr As-Salafi fi Miṣr*", ed. Faras Khoirullah, *At-Taḥawwulât As-Salafiyyah; Ad-Dilâlât, At-Tadâ'iyah wa Al-Afâq*, (Jordania: Muassasah Freiderich Ebert, 2013), 15.

¹¹ Fayid, 64.

dengan tujuan untuk memenangkan panggung politik di masa berikutnya.¹² Bagi Salafisme, momentum ini juga digunakan untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap ideologinya terkait politik. Sehingga dengan langkah cepat pada tahun 2011 lima partai Salafi berhasil didirikan.¹³

Perubahan strategi gerakan Salafisme dari dakwah menuju politik praktis yang nyata adalah peristiwa baru dalam sejarah Salafisme di Mesir. Mereka yang tidak memiliki pengalaman politik, justru dengan cepat meraih kesuksesan dalam pemilu.¹⁴ Perubahan gerakan Salafisme Mesir kepada strategi politik dengan tujuan menjaga agama, dakwah, dan agar ideologi Salafisme bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat, menjadi semacam model yang khas dari politik Salafisme Mesir. Menariknya, sebagai kelompok yang ketat terhadap hubungan dengan agama lain itu, Salafisme dalam representasi partai politik melakukan penjangkaran anggota dari kaum perempuan dan umat Kristiani, sebagaimana terjadi kepada partai An-Nur,¹⁵

Perubahan ini terjadi dalam proses-proses menuju Pos-Islamisme di Timur Tengah, seperti yang digambarkan oleh Asef Bayat. Jika diukur dengan Pos-Islamisme, Bayat yang memunculkan istilah Pos-Islamisme, menyatakan bahwa istilah ini sebenarnya sesuai diterapkan hanya kepada realitas masyarakat Republik Islam Iran. Namun inti dari penggunaan istilah ini sebenarnya menunjuk

¹² Ibnu Burdah, *Menuju Dunia Arab Baru: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 52.

¹³ Hizb An-Nour menjadi partai Salafi yang sukses meraih posisi utama dalam koalisi dengan Ikhwanul Muslimin dan meraih 25 persen kursi di Parlemen dalam tubuh koalisi. Lihat Stephan Lacroix, *Miṣr: As-Salafiyūn Al-Bragmatiyūn*, diakses dari <http://www.carnegie-mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984> (diakses 15 Desember 2017).

¹⁴ Nathan J. Brown, *Islamic Politics in the New Egypt* (Washington D.C.: Carnegie Endowment, 2013), 8.

¹⁵ Syalathah, 18.

kepada metamorfosis daripada ide, pendekatan dan praktek-praktek keagamaan sehari-hari.¹⁶

Orientasi perubahan Salafisme kepada arah Pos-Islamisme, sementara juga dapat ditemukan dari sudut pandang adanya kompetisi organisasional. Asef Bayat dalam penjelasannya yang lain menguraikan bahwa Pos-Islamisme berawal dari kesadaran kelompok Islamisme atas keganjilan dan ketidaksempurnaan sistem yang mereka miliki. Sehingga kemudian Pos-Islamisme menjadi proyek untuk meleburkan prinsip-prinsip Islamisme dengan prinsip-prinsip modernitas, seperti hak, kebebasan dan pembebasan.¹⁷ Bagi peneliti, dari penjelasan Asef Bayat tersebut mengandung premis bahwa sesungguhnya ada latarbelakang kompetisi dalam proyek Pos-Islamisme dengan menjadikan modernisme sebagai visi yang harus ditaklukkan kedalamnya.

Bagi peneliti, perubahan ini menarik dari aspek perdebatan internal dan eksternal Salafisme ketika dikaitkan dengan nuansa politik yang sedang berjalan saat itu. Sehingga politik Salafisme memiliki model yang khas, bahkan ketika nuansa rezim lama kembali lagi melalui tangan Abd Al-Fattah As-Sisi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, hal menarik bagi peneliti yang menjadi pertanyaan untuk diteliti adalah:

¹⁶ Asef Bayat, "What Is Pos-Islamism?", ISIM Review (Auntumn 2005), 5. Asef sendiri kemudian menegaskan, istilah ini kemudian digunakan oleh para peneliti di Eropa untuk menunjuk kepada "...a shift in the attitudes and strategies of islamist militants in the Muslim World."

¹⁷ Asef Bayat, *Pos-Islamisme* terj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LKis, 2011), 19-20.

1. Bagaimana pergeseran sikap politik Salafisme Mesir terjadi setelah Revolusi Januari 2011?
2. Wacana apa saja yang mempengaruhi pergeseran tersebut dan apa dampaknya bagi alur pergerakan Salafisme di Mesir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perpolitikan kelompok Salafi Mesir setelah memutuskan untuk menentukan pilihan politiknya pasca Revolusi 25 Januari 2011. Karakteristik pembentukan ideologi keagamaan yang sebenarnya tidak melepaskan aspek politik begitu saja juga menjadi pertimbangan untuk penelitian ini. Penelitian ini juga kemudian hendak menekankan adanya satu perspektif arah gerakan politik praktis Salafisme Mesir Salafi yang terus-menerus berubah dan selalu bermotif politik. Satu hal yang peneliti tekankan dalam penelitian ini menyumbang porsi yang besar bagi khasnya gerakan politik praktis Salafisme Mesir semenjak itu hingga hari ini.

D. Kajian Pustaka

Sebagai penelitian yang menggunakan kajian pustaka sebagai sumber data, penulis mengelompokkan sumber-sumber tersebut kepada dua kelompok. Pertama adalah literatur primer yang secara khusus memuat penelitian tentang Salafisme Mesir pasca Revolusi 25 Januari 2011. Kedua adalah literatur sekunder yang

membahas tentang Salafisme secara umum, maupun Salafisme berkaitan dengan ideologi dan relasinya dengan masyarakat dan kekuasaan.

Litaratur primer yang penulis gunakan antara lain hasil penelitian Jonathan Brown menulis paper berjudul *Salafis and Sufis in Egypt*.¹⁸ Terlepas dari sikap Salafisme yang kontroversi, Brown menyoroti hubungan antara kemunculan partisipasi politik Salafisme Mesir dengan kasus-kasus kekerasan. Pertumbuhan protes massa Januari 2011 yang semakin efektif dan besar memicu represi rezim melalui pasukan kepolisian terhadap massa. Kekerasan rezim terhadap massa ini kemudian memunculkan perpecahan opini para tokoh Salafisme Mesir dalam menilai sikap rezim dan pemrotes. Tokoh-tokoh Salafi yang tajam politik membela massa dengan mengutuk sikap rezim. Sementara tokoh Salafisme lain, seperti Salafi Damanhur dan Mustafa Al-‘Adawi, mengancam aksi protes dan menyatakan bahwa para korban meninggal dalam kekerasan antar sesama Muslim tersebut bukan *syahîd*. Namun meski adanya keterpecahan ini, dengan terbawa nuansa protes yang semakin tidak terkontrol kemudian, massa sebagian Salafisme juga turut menyumbang kekerasan. Massa Salafisme tidak melewatkan peluang untuk melakukan aksi yang mereka yakini sebagai perjuangan. Salah satunya adalah aksi pengambilalihan Masjid Besar An-Nur di Abbasiah; sebuah masjid sentral di distrik tersebut yang dikelola oleh Kemetrian Agama. Terpengaruhnya Salafisme dengan kekerasan tersebut penting untuk dikaitkan, karena menjadi salah satu sebab Salafisme berpolitik praktis untuk menutup aksi-aksi kekerasan semacam itu.

¹⁸ Jonathan Brown, *Salafis and Sufis In Egypt*, (Washington D.C.: Carnegie Endowment, 2011).

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Nathan J. Brown dalam tulisannya *Islamic and Politics in The New Egypt*.¹⁹ J. Brown mengangkat perhelatan kekuatan Islamis dan politik rezim dalam wilayah ideologi politik dan parlemen sebagai isu utama. Baik Ikhwanul Muslimin, Salafisme, maupun Al-Azhar, semuanya saat itu menjadi kekuatan Islamis terbesar di Mesir dan berperan secara menonjol dalam nuansa kontestasi. Namun pilihan politik Ikhwanul Muslimin dan Salafisme yang membawa serta muatan agama, belum memiliki visi dan misi politik yang jelas dan meyakinkan. Salafisme pada awalnya tidak hanya mengalami perdebatan internal terkait pilihan politik mereka. Salafisme juga, di satu sisi, baik doktrin maupun interaksi praktis, pada dasarnya tertutup; sebuah watak yang sulit untuk beradaptasi dengan alam demokrasi. Di sisi lain doktrin asli mereka adalah doktrin yang apolitik. Sehingga ketidakjelasan visi misi politik Salafisme bisa dilacak sejak awal, sejak mereka memunculkan reaksi. Pertama, mereka bercita-cita mengawal Referendum Konstitusi rezim lama, hanya bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip *syarî 'ah* yang tertuang dalam Konstitusi lama. Kedua, Salafisme merupakan organisasi dakwah yang telah mapan. Sehingga mereka tidak hanya melihat kemudahan memobilisasi massanya untuk mendukung pilihan politiknya, namun juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk arah itu. Kepercayaan diri itu tumbuh secara berkebalikan sebagai sebab adanya tidungan-tudungan rasisme keagamaan dari berbagai kelompok selama ini. Mereka merasa selama ini sulit diterima diberbagai posisi, dan sering

¹⁹ Nathan J. Brown, *Islamic Politics in the New Egypt* (Washington D.C.: Carnegie Endowment, 2013).

menjadi bahan olokan. Sehingga mempertahankan prinsip-prinsip *syarī'ah* dalam posisi yang tidak berubah, akan sulit dihargai juga.

Kemudian penelitian Ahmad Zaghlul Syalathah dalam *Ad-Da'wah As-Salafiyyah As-Sakandariyyah; Masarat At-Tandzim wa Maalat As-Siyasah* juga penulis gunakan.²⁰ Syalathah menegaskan agar kajian terhadap peralihan sikap politik Salafisme Mesir tidak dipisahkan dari perjalanan sejarah yang telah dilalui Salafisme Mesir sendiri. Ini menjadi kunci pertama, yang kemudian dapat menemukan jawaban mengapa faksi *Da'wah Salafiyyah (Salafiyyah Iskandariyyah)* yang memelopori aktivitas politik Salafisme di masa transisi. Syalathah mengetengahkan sejarah munculnya Faksi *Da'wah Salafiyyah* yang memang telah memiliki pola yang politis dalam gerakannya, untuk menjawab paradoks Salafisme politik. Kunci kedua, dengan menguraikan pola persebaran Salafisme Faksi ini, khususnya di Propinsi Alxandria (*Iskandariyyah*), yang faktor kuatnya basis Salafisme secara umum di tengah masyarakat, dari pada Ikhwanul Muslimin. Kunci ketiga, dengan memahami teori-teori induk dalam ideologi Salafisme sendiri, yang menjadi dasar pergerakan. Teori-teori induk tidak bisa dinafikan, sebab ia berperan sangat besar terhadap kepercayaan diri Faksi *Ad-Da'wah As-Salafiyyah* untuk memilih tindakan yang tampak paradoks.

Dalam penelitiannya yang lain berjudul *Mustaqbal At-Tahawwulat Dakhil At-Tayyar As-Salafi fi Mishr*,²¹ Syalathah cukup banyak menguraikan pernyataan-pernyataan para tokoh Salafisme Mesir dan perdebatan mereka terkait pergeseran sikap politik tersebut. Salah satu legitimasi yang pada gilirannya muncul dari

²⁰ Ahmad Zaghlul Syalathah, "*Ad-Da'wah As-Salafiyyah As-Sakandariyyah: Masârât At-Tandzîm wa Ma â lâ t As-Siyâsah*", Jurnal *Mustaqbal Al-'Arabi*, Vol. 443 (Januari, 2016).

²¹ Syalathah, "*Mustaqbal At-Taḥawwulât Dâ khilâ At-Tayyâr As-Salafi fi Miṣ r*".

figur-figur Salafisme untuk pilihan politik mereka adalah, “*Majelis Rakyat Mesir bukan Majelis yang kufur dan thaghut*”.

Penelitian Syalathah yang lain, dalam buku berjudul *Al-Halah As-Salafiyyah Al-Mu'ashirah fi Mishr*,²² juga penulis gunakan untuk membantu memahami peta pengelompokan dan pemikiran Salafisme Mesir. Meski dari judul mengarah kepada konteks saat ini, namun buku yang sebenarnya ditulis pada tahun 2010 ini memuat penjelasan mengenai faksi-faksi dan pemikiran Salafisme Mesir, berbagai kutipan dan dokumen yang berisi diktum-diktum ideologi Salafisme sebelum terjadinya Revolusi 25 Januari. Buku ini membantu penulis memperkaya informasi.

Demikian juga uraian Ramadan Yaldrim dalam papernya berjudul *Assalafiyyah Min Ba'd Ar-Rabi' Al-'Arabi: Mishr Anmudzajan*. Yaldrim secara khusus menguraikan informasi pergerakan politik Salafisme sejak Revolusi 25 Januari.²³ Yaldrim memetakan Faksi-faksi Salafisme Mesir sejak awal berdiri, kemudian memetakan dukungan politik faksi-faksi tersebut kepada kandidat Presiden hingga mengerucut kepada Muhammad Mursi.

Penelitian lainnya yaitu paper berjudul *The Salafi Nour Party in Egypt*²⁴ yang ditulis oleh Kristen McTighe. Didalam hasil penelitiannya itu, Kristen secara khusus menguji posisi Partai An-Nur dalam kontestasi politik pasca jatuhnya Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Partai An-Nur setelah menjadi

²² Ahmad Zaghlul Syalathah, *Al-Ḥālah As-Salafiyyah Al-Mu'āshirah fi Miṣr*, (Kairo: Maktabah Madbouli, 2016).

²³ Ramadan Yaldrim, “*Assalafiyyah Min Ba'd Ar-Rabī' Al-'Arabi: Miṣr Anmūzajan*”, Jurnal Al-Ilahiyyat Al-Akadimiyyah, Vol. 1, (Februari 2015).

²⁴ Kristen McTighe, “*The Salafi Nour Party in Egypt*”, Al-Jazeera Center for Studies, (Maret 2014).

penyokong pemenangan Ikhwanul Muslimin di Parlemen, kemudian justru berbalik mendukung aksi protes yang menuntut Mursi mundur dari jabatan Presiden. Pada akhirnya An-Nur menjadi penyokong Militer yang berhasil menutup jabatan kepresidenan Mursi.

Hal ini kemudian menuntut adanya pembacaan terhadap perubahan sikap partai An-Nur sebagai representasi utama kelompok Salafisme. Sebelum menemukan spekulasi sendiri, Kristen menyuguhkan dua pembacaan yang menjelaskan mengapa partai An-Nur menjadi pendukung Militer. Pertama, partai An-Nur berpihak kepada Militer dengan tujuan mengamankan posisi dakwah Salafisme. Setelah An-Nur memprotes penghapusan pasal 219,²⁵ undang-undang tahun 2012, Partai tersebut sempat dibekukan di Parlemen karena masih sebagai partai berbasis agama. Untuk menyelamatkan diri, partai An-Nur kemudian merubah retorika dengan menegaskan bahwa mereka tidaklah berbasis agama, disusul kemudian berpihak kepada Militer. Namun Kristen menyanggah argumen ini, setelah ada kenyataan bahwa rezim kemudian justru menyerahkan sepenuhnya sentralisasi dakwah Islam, sekaligus manajemen dakwah di seluruh masjid, kepada Lembaga Al-Azhar (dibawah kepemimpinan Ahmad Thayyib). Sikap Al-Azhar yang sepanjang waktu anti terhadap Salafisme, membatalkan pembacaan diatas. Jika maksud berpihaknya partai An-Nur kepada rezim bertujuan untuk kepentingan penyelamatan masjid-masjid dan dakwah Salafi, seharusnya rezim

²⁵ Sebagaimana disebutkan dalam draf *Masyrū' Dustūr Jumhuriyyah Miṣr Al-'Arabiyyah*, Pasal tersebut berbunyi (jika dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia): "*Prinsip-prinsip Syari'ah Islam mencakup instrument-instrumennya yang universal, kaidah-kaidah akarnya dan fikihnya, dan sumber-sumbernya yang diakui, dalam madzhab Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah.*" Penghapusan pasal ini menuai protes dari kalangan Islamis, dan kemudian mengakibatkan represi Militer terhadap protes tersebut.

memberikan kewenangan penuh atas masjid-masjid Salafi dan dakwahnya kepada mereka.

Kedua, partai An-Nur berpihak kepada militer dengan tujuan membawa Mesir secara pelan-pelan kepada negara berbasis *syarî'ah*. Hal ini diindikasikan oleh protes partai An-Nur terhadap penghapusan pasal 219, dengan cara keluar (*walk out*) dari forum Parlemen. Akan tetapi faktanya, sikap *walk out* tersebut tidak berdampak negatif bagi partai dari para pendukung rezim. Faksi Salafisme Ad-Da'wah As-Salafiyyah yang menjadi penaung partai An-Nur tidak menjadi sasaran operasi Militer terhadap Islamis yang berpolitik praktis. Faksi tersebut kemudian justru berpihak kepada cara yang ditempuh oleh Militer.

Setelah membatalkan dua argumentasi diatas, Kristen menyimpulkan argumentasinya sendiri. Menurutnya, sikap Salafi yang berubah-ubah ini sebenarnya mengandung kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari pihak luar, yaitu Arab Saudi. "*The links between Egyptian Salafism and Saudi Arabia are clear,*" tulis Kristen. Sebagai kelompok Islamis yang rata-rata masyarakatnya berasal dari kalangan pinggiran (puritan) dan miskin, tidak mungkin Salafi dapat berpolitik praktis dan meraih kemenangan besar tanpa sokongan dana. Menteri Keadilan melaporkan aliran donasi terbesar pada rentang tahun 2010 - 2011 bahkan mengalir kepada kelompok Salafi, melalui jalur Kuwait dan Qatar. Sebagaimana Saudi telah menghabiskan setidaknya 70 juta dollar Amerika selama 30 tahun untuk menyebarkan paham Wahabisme dalam berbagai media dan instrumen.

Kemudian penelitian Ammar Ahmad Fayid dalam tulisannya yang berjudul “*Assalafiyyūn min Syar’iyyah Al-Fatwâ ilâ Syar’iyyah Al-Intikhâb*”²⁶ Fayid terutama menyorot kiprah Salafi dan sentralisasinya. Sekian lamanya kelompok Salafisme ada di Mesir, namun mereka tidak memiliki kiprah kenegaraan. Hal ini disebabkan mereka anti terhadap politik praktis, dan hanya fokus kepada dakwah. Mereka tidak memiliki kemampuan birokrasi dan interaksi dalam alam politik, serta tidak memahaminya. Mereka akhirnya tidak memiliki jasa apapun dalam gerakan nasional, baik itu dalam perjuangan kemerdekaan maupun mengusulkan solusi dalam isu-isu nasional, khususnya mengenai kebebasan dan hak asasi manusia. Sedemikian akutnya prinsip apolitik Salafisme Mesir. Fayid menegaskan bahwa peran para *syaikh* dalam menguatkan prinsip apolitik sangat penting. Peran ini yang mampu menahan massa Salafisme untuk tidak terlibat sama sekali dalam politik praktis, sampai ketika muncul isu-isu atau peristiwa politik. Sentralisasi gerakan dan pemikiran mereka kepada para *syaikh* begitu kuat.

Maka ketika Salafisme memutuskan untuk berpolitik dan kemudian mendirikan partai dengan proses yang cukup cepat, hal ini bisa dipahami. Sekali lagi peran *syaikh* yang menentukan percepatan ini. Begitu juga dibalik kesuksesan Salafisme di Parlemen, ada sokongan para *syaikh*. Namun, menurut Fayid, disinilah letak masalah yang akan merintanggi gerakan politik praktis Salafisme. Gerakan Salafisme dengan model sentralisasi *syaikh* ini akan selalu bergantung kepada fatwa-fatwa. Diktum-diktum dan pilihan-pilihan politik akan kesulitan

²⁶ Fayid, “*Assalafiyyūn min Syar’iyyah Al-Fatwâ ilâ Syar’iyyah Al-Intikhâb*” .

menghadapi fatwa-fatwa. Maka, stabilitas gerakan mereka di ranah politik harus disokong secara serius oleh stabilitas hubungan para *syeikh* dan tokoh-tokoh gerakan.

Kemudian penulis juga menggunakan buku yang ditulis oleh Ahmad Salim dan Amr Basyuni²⁷ berjudul *Ma Ba'da As-Salafiyyah; Qirâ'ah Naqdiyyah fî Al-Khiṭâb As-Salafi Al-Mu'aṣir*.²⁸ Buku tersebut termasuk buku mengenai Salafisme yang padat. Penulis dalam buku tersebut sedang melakukan kritik terhadap pergerakan Salafisme hari ini dari aspek ideologi dan kesejarahan. Bagaimanapun juga keberadaan Salafisme – yang lebih dikenal sebagai kelompok yang intens terhadap dakwah dan pemurnian ideologi – tidak bisa dilepaskan dari pergulatan politik dalam arti luas. Bahkan pergulatan politik praktis yang kemudian dipilih oleh Salafisme di Mesir menjadi pergeseran baru yang penting bagi keberadaan Salafisme, karena menjadi sebuah pilihan politik yang besar didalam alam demokrasi. Hal ini berbeda sekali dengan Salafisme di Saudi Arabia misalnya. Penulis mencatat beberapa perubahan yang terjadi dalam tubuh Salafisme Mesir, yang dalam istilah Tarrow, sebagai *outcome* dimana pergulatan politik Salafisme dalam arti luas itu menyumbang porsi cukup besar terhadapnya. Itu sebabnya, pilihan politik praktis yang terjadi tidak perlu dipermasalahkan. Hal yang menjadi masalah adalah kegagalan yang terjadi berikutnya, menjadikan Salafisme Mesir khususnya meredup. Ia mengalami krisis yang berlapis-lapis, sementara tampaknya belum ada kepastian dari bagian mana kebangkitan

²⁷ Sebagian pengamat berpendapat dua penulis ini beraliran Salafisme. <http://www.dorar.net/article/1823> (diakses 5 Juli 2018).

²⁸ Ahmad Salim, Amr Basyuni., *Mâ Ba'da As-Salafiyyah; Qirâ'ah Naqdiyyah fî Al-Khiṭâb As-Salafi Al-Mu'aṣir*, (Beirut: Namaa Center for Research and Studies, 2015).

Salafisme Baru akan muncul. Salafisme tidak akan tampak kebangkitannya jika ideologi lama tentang politik tidak segera diperbaiki.

Adapun literatur sekunder mengenai Salafisme antara lain penelitian Chris Heffelfinger yang berjudul *Trends in Egyptian Salafi Activism*. Penelitian Ashraf El-Sherif yang berjudul *Egypt's Salafists at a Crossroads*. Demikian juga literatur mengenai ideologi dan gerakan Salafi pada abad 20 yang sangat membantu penulis memahami peta kelompok Salafisme. Diantara literatur tersebut adalah hasil penelitian Quintan Wiktorowicz yang berjudul *Anatomy of the Salafi Movement* dan ontologi Salafisme Global oleh Roel Meijer.²⁹ Penulis juga menggunakan hasil penelitian Noorhaidi Hasan terutama pada tulisannya yang berjudul *The Failure of Wahhabi Campaign: The Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia*, juga hasil penelitian Henri Lauziere yang berjudul *The Construction of Salafīyya: Reconsidering Salafism From The Perspective Of Conceptual History*. Juga hasil penelitian Hasan Kunakata terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyah dengan judul *An-Naẓariyyah As-Siyāsiyyah 'Inda Ibn Taimiyah*,

Selain itu, literatur dari para ideolog Salafisme juga tidak penulis lewatkan, seperti yang ditulis Muhammad ibn Said Al-Qahtani berjudul *Al-Walā wa Al-Barā fi Al-Islām*, buku Ahmad Farid berjudul *Assalafīyyah Qawā'id wa Uṣūl*, dan buku Abu Bashir At-Turtusi yang berjudul *Hukm Al-Islām f Ad-Dimuqrāṭīyyah wa At-Ta'addudīyyah Al-Hizbiyyah*.

²⁹ Penulis menggunakan versi terjemahan kedalam Bahasa Arab yang berjudul *As-Salafīyyah Al-'Alamiyyah: Al-Ḥarakāt As-Salafīyyah Al-Mu'āṣirah fi 'Alam Mutagayyir*, terj. Muhammad Mahmud At-Tubah (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014).

E. Kerangka Teoritis

Sikap politik Salafisme Mesir yang menurut beberapa pengamat dinilai sebagai sikap politik pragmatis itu barangkali tidak disadari oleh Salafisme sendiri. Sehingga sikap yang sebenarnya kontradiktif – dengan doktrin politik Salafisme – tersebut terus bergulir dalam lingkungan politik praktis. Fakta yang mengejutkan banyak kalangan ini kemudian melahirkan berbagai analisa. Yang menarik tentu saja adalah muatan kontradiksi tersebut, sehingga menimbulkan berbagai macam analisa. Kajian Penulis terhadap sikap Salafisme tersebut menggunakan kerangka teoritis pada dua wilayah, yaitu wilayah eksternal dan wilayah internal. Pada wilayah eksternal, penulis menggunakan teori gerakan sosial baru yang dikembangkan oleh Sidney G. Tarrow.

Sebagai salah satu ilmuwan sosial yang mengembangkan teori gerakan sosial baru, Tarrow mengajukan suatu premis besar. Semenjak tahun 60-an, gerakan sosial di Amerika, Eropa, dan Dunia Ketiga menampak dalam berbagai variasi, baik dari segi kelompok sosial maupun tujuan dan cita-cita pergerakannya. Gerakan Islamis kemudian menyusul menjadi yang terbaru. Namun kesemuanya sama-sama menggunakan model protes dijalanan dengan tujuan menuntut perubahan (*demanding change*) yang dilakukan oleh masyarakat umum (*ordinary people*) berhadapan dengan kekuasaan. Suatu hal yang unik bagi Tarrow adalah bahwa gerakan-gerakan ini ternyata ditempatkan, disokong, serta dikoordinasi untuk melawan kekuasaan, atau dengan kata lain dimobilisasi.³⁰

³⁰ Sidney G. Tarrow, *Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, cet. 3, 2011), 6.

Gerakan sosial semacam ini yang kemudian membawa Tarrow untuk mengajukan tiga teka-teki besar.

Ada tiga teka-teki besar yang diajukan Tarrow³¹. Pertama, kondisi apa yang membawa kekuatan pergerakan dapat muncul? Kedua, bagaimana dinamika pergerakan yang dapat melanggengkan kekuatan atas pergerakan tersebut? Ketiga, mengenai dampak dan hasil dari gerakan tersebut. Gerakan sosial yang menarik perhatian Tarrow tersebut bermula dari situasi dimana hubungan-hubungan dalam kekuasaan mengalami perseteruan, atau apa yang disebutnya sebagai *contentious politics*. Perpecahan timbul setidaknya dari dua faktor. Pertama adalah ketika masyarakat umum mulai mendapatkan pintu masuk kepada wilayah perseteruan para elit kekuasaan. Kedua, ketika nuansa politik membuka peluang yang menawarkan keuntungan-keuntungan (*incentives*) bagi para aktor atau kelompok sosial yang kekurangan sumber daya.³²

Faktor pertama dapat meningkatkan tensi perseteruan ketika orang-orang tersebut telah mendapatkan sumber daya eksternal yang memungkinkan mereka melakukan perubahan. Faktor kedua dapat meningkatkan perseteruan ketika para aktor atau kelompok sosial itu sebenarnya sudah terancam dengan resiko modal yang dapat merusak keberadaan mereka, namun mereka masih bisa memastikan adanya peluang untuk menunjukkan diri.³³

³¹ Muzayyin Ahyar, "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam", Jurnal Walisongo, Vol. 23, No. 1 (Mei 2015), 5.

³² Sidney G. Tarrow, 6.

³³ Sidney G. Tarrow, 160.

Kemunculan aksi-aksi kolektif yang menghadapkan aksi dengan kekuasaan semacam itu sangat bergantung kepada perubahan struktural. Didalamnya terdapat variabel-variabel seperti nuansa politik, peluang dan ancaman, dan aksi kolektif dari kelompok-kelompok sosial. Hal inilah yang mendorong Tarrow untuk menggali lebih lanjut, sehingga mengusulkan teori Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structures*).

Tarrow menyatakan Struktur Kesempatan Politik (SKP) sebagai “*dimensions of the political environment that provide incentives for people to undertake collective action by affecting their expectations for success or failure.*” Struktur Kesempatan Politik terletak pada dimensi-dimensi atau segi-segi dalam lingkungan politik berdasarkan syarat tertentu. Karl-Dieter Opp memperjelas definisi tersebut, bahwa dimensi-dimensi lingkungan politik dinyatakan sebagai struktur kesempatan hanya ketika dimensi-dimensi tersebut mampu mengubah harapan-harapan yang ada menjadi keberhasilan atau kegagalan.³⁴

Relevansi teori Struktur Kesempatan Politik untuk penelitian ini ditemukan dari beberapa hal. Pertama, perubahan struktural Pemerintahan khususnya setelah Revolusi 25 Januari 2011 memberikan sinyal adanya peluang bagi kelompok Salafisme Mesir untuk turut berpartisipasi dalam politik praktis. Terjadinya Revolusi tersebut merupakan semacam angin segar bagi Salafisme Mesir puluhan tahun lamanya Mesir dipimpin dengan nuansa militer dan kediktatoran. Hal yang sangat mendukung posisi Salafisme Mesir dalam politik

³⁴ Karl-Dieter Opp, *Theories of Political Protest and Social Movements; A Multidisciplinary introduction, critique, and synthesis*, (New York: Routledge, 2009), 170.

praktis adalah kuatnya jaringan Islamis ditengah banyaknya kelompok sosial yang mencari peruntungan dalam nuansa politik rezim yang sekarat. Kedua, meski Salafisme dikenal sebagai kelompok Islamis yang anti politik, namun mereka tidak diam terhadap isu-isu politik begitu saja. Mereka berdialog dan memberikan komentar terhadap isu-isu politik yang terjadi. Hal ini menjadi modal bagi para figur Salafisme Mesir untuk menggulirkan pembingkaiian wacana tentang perkembangan politik, khususnya pada nuansa transisi. Ketiga, gerakan politik Salafisme Mesir merupakan gerakan baru, dan itu sebabnya mereka menjadi aktor baru. Tarrow menegaskan bahwa kontestasi benar-benar terjadi ketika dalam nuansa politik yang berubah itu muncul pemain atau aktor baru yang selama ini tidak memiliki akses reguler terhadap institusi Pemerintah.³⁵ Salafisme tidak hanya sebagai aktor baru, mereka bahkan selama ini tidak memiliki hubungan politik secara langsung dengan rezim. Keempat, Struktur Kesempatan Politik sebagai teori gerakan sosial baru mendefinisikan sikap politik Salafisme sebagai gerakan non-kelas, berdasarkan pergerakannya yang lebih mengutamakan aksi akar rumput, dan mengandalkan model komunikasi dan identitas kolektif. Sikap yang mengandung latar belakang dan tujuan-tujuan yang rumit, apalagi sikap tersebut dinilai kontradiktif dengan doktrin-doktrinnya, juga menunjukkan hal itu.

Kemudian pada wilayah internal, Penulis menggunakan konsep-konsep pemerintahan dalam doktrin keagamaan Salafisme. Dalam tradisi Islam, konsep pemerintahan biasanya dibahas dalam tema *khilâfah* atau *imâmah*. Istilah

³⁵ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia* (Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, 2006), 92.

khilâfah – meski sama maksudnya dengan *imâmah* – lebih sesuai digunakan dari pada *imâmah*, karena *khilâfah* tidak mengandung arti khusus, sementara *imâmah* merupakan istilah yang terbentuk dari pandangan-pandangan politik Syi'ah dan mengandung arti khusus didalamnya. Selain itu, istilah *khilâfah* lebih dekat dengan maksud sebagai pengganti Rasulullah dari pada *imâmah*.

Pandangan-pandangan Salafisme mengenai pemerintahan Islam semakin relevan untuk menganalisa sikap politiknya berdasarkan beberapa alasan. Pertama, sebagai suatu kelompok atau sekte Islam, Salafisme tentu saja menggunakan pandangan hidup Islam sebagai doktrin-doktrinnya. Demikian pula konsep-konsep politik Salafisme tidak bisa dipisahkan dari pandangan hidup Islam. Kedua, adanya pembahasan mengenai politik yang terus bergulir, baik dalam level konsep teoritik maupun situasi politik, dari para tokoh Salafisme di berbagai tempat. Hal ini tentu saja karena interaksi antara Salafisme dengan negara terus terjadi, demikian pula perbincangan tema politik yang terus bergulir antara tokoh Salafisme dengan lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, digunakannya konsep-konsep keagamaan oleh faksi-faksi Salafisme Mesir untuk melegitimasi partisipasi politik praktis. Hal yang menarik adalah konsep yang digunakan untuk melegitimasi tersebut pada dasarnya bukan doktrin politik.

Terkait perubahan sikap politik Salafisme Mesir dari sikap apolitik kepada pragmatisme politik, ada tiga tema yang akan dibahas oleh penulis melalui pandangan Salafisme terhadap pemerintahan Islam, yaitu:

- a. Urgensi Pemerintahan (Mengangkat Penguasa)

b. Urgensi Kepatuhan Terhadap Penguasa

c. Pemerintahan Demokrasi

Sebagai kelompok yang memiliki figur agung, Salafisme terpengaruh hampir dalam semua ideologinya oleh tokoh klasik bernama Ibn Taimiyah dan Muhammad ibn Abd Al-Wahhab. Ibn Taimiyah berbicara mengenai pemerintahan dalam beberapa karyanya seperti *Minhâj As-Sunnah An-Nabawiyah fî Naqđ Kalâm As-Syî'ah wa Al-Qadariyah*, *Al-Hisbah fî Al-Islâm*, dan *As-Siyâsah As-Syar'iyah*. Namun berkaitan dengan dua tema diatas, penjelasan Ibn Taimiyah mengenai hal itu lebih banyak terdapat dalam kitab *Minhaj* nya.

Ibn Taimiyah mengukuhkan bahwa berdirinya pemerintahan bagi masyarakat adalah sangat penting, bagaimanapun keadaannya. Oleh sebab itu, penguasa yang memerintah wajib ditaati. Apabila penguasa terpaksa harus ditumbangkan, hal ini bergantung kepada kondisi tertentu yang membolehkan penumbangannya. Demikian garis besar teori Ibn Taimiyah yang dianut Salafisme – tak terkecuali di Mesir. Jika ditelisik lebih jauh, pemikiran Ibn Taimiyah dalam tema ini sangat dekat dengan pemikiran tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan para peneliti memasukkan pandangan Ibn Taimiyah ini ke dalam wilayah doktrin Sunni. Kesamaan Ibnu Taimiyah dengan Asy'ariyah dalam tema ini kemudian terlihat pada kesamaan sikap diam antara para tokoh Salafisme Mesir dengan institusi Al-Azhar sepanjang demonstrasi massa yang menuntut pengunduran diri Husni Mubarak. Yang menarik adalah ketika beralih kepada tema demokrasi dan berbagai sub temanya khususnya mengenai konsep parlemen dan mekanisme pemungutan suara, teori dari para tokoh Salafisme modern menjadi sangat relevan

untuk menemukan alasan pragmatisme politik Salafisme Mesir. Tema ini kemudian memperjelas respon Salafisme terhadap situasi politik yang ada. Tema ini juga menjadi petunjuk adanya perbedaan dari para tokoh Salafisme berdasarkan faksi yang dianut terkait situasi politik yang tengah berjalan.

Perubahan sikap gerakan kelompok Salafi di Mesir pasca *Arab Spring*, dari sikap apolitik menjadi berpolitik, membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap konstelasi perpolitikan di Mesir pasca Arab Spring. Koalisi partai Salafi telah menyokong sayap Islamis meraih kemenangan telak atas partai-partai koalisi rezim, juga partai-partai non-Islamis. Di lain kesempatan, pada revolusi Juni 2013, kelompok Salafisme juga menjadi salah satu unsur politik yang menggulingkan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Salafisme kemudian bahkan menjadi kelompok Islamis yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap kembalinya rezim militer memegang pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok Salafisme di Mesir pada rentang setelah *Arab Spring* hingga naiknya Abd Al-Fattah As-Sisi menuju Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perubahan sikap politik kelompok tersebut, baik dialektika internal dan eksternalnya, juga keberadaan kelompok tersebut serta pengaruhnya dalam konstelasi politik nasional Mesir. Namun karena penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, maka penelitian lebih dominan bersentuhan dengan sumber-sumber pustaka dengan berbagai levelnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu kondisi yang sedang terjadi pada suatu kelompok sosial.³⁶ Melalui metode ini, peneliti mendapatkan data dan informasi dari bahan-bahan pustaka yang dekat dengan tema utama.

Sebagai penjelasan skema penelitian, peneliti pertama-tama memetakan rumusan masalah untuk menemukan tema-tema utama yang akan dibahas berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian peneliti mencari data-data mengenai ideologi politik gerakan Salafi di Mesir baik sejarah maupun tokohnya, kultur gerakan Salafi di Mesir dalam ranah politik dan sosial, peristiwa *Arab Spring* di Mesir, juga situasi sosial politik dimana Salafisme Mesir mengubah haluan kepada jalur politik.

Adapun data diperoleh melalui referensi pustaka berkaitan dengan tema Salafisme, politik Islam, aktivisme Islam, peristiwa Revolusi 25 Januari 2011 dan Revolusi Juni 2013, dan pos-Islamisme. Data literatur yang dimaksud, penulis peroleh dalam berbagai bentuk, baik berupa buku, paper jurnal, berita, sebagian kecil video, dan dari berbagai media yang tersedia, baik buku maupun elektronik.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, kerangka teoritis, serta metode penelitian yang akan menjadi tema utama dalam pembahasan penelitian selanjutnya.

³⁶ Consuelo G. Sevilla (Ed.), *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993).

Bab kedua akan diawali dengan penguraian mengenai sejarah Salafisme khususnya di Mesir, dan pengaruhnya di Mesir. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai ideologi dan konsep-konsep induk teologi Salafisme, serta kaitannya dengan aspek-aspek politik dalam arti luas. Setelah itu pembahasan yang terpenting dalam bab ini adalah mengenai doktrin politik Salafisme yang memang telah terbentuk sebagai apolitisme.

Bab ketiga membahas sikap Salafisme Mesir pasca Revolusi Januari 2011 sebagai peristiwa Musim Semi Arab di Mesir. Penulis menguraikannya dalam beberapa bentuk, yaitu: partisipasi kelompok Salafisme dalam protes 25 Januari, pembentukan partai-partai politik, pembentukan koalisi politik, partisipasi pemilihan umum, serta hasil akhirnya. Namun penulis lebih fokus terhadap hal-hal penting yang mengiringi atau menjadi latarbelakang Salafisme berada pada posisi-posisi tersebut.

Bab keempat merupakan temuan-temuan dari penelitian penulis dan jawaban bagi rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan.

Kemudian bab kelima berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Revolusi 25 Januari menjadi jalan bagi berakhirnya kekuasaan Husni Mubarak. Ia sekaligus menjadi jalan bagi kontestasi kelompok-kelompok revolusi untuk naik ke panggung politik yang terbuka, termasuk Salafisme Mesir. Sebagaimana Salafisme di penjuru dunia, Salafisme Mesir menganut doktrin apolitik terhadap sistem dan situasi politik yang sedang berjalan. Salafisme menganut doktrin tersebut karena sistem dan situasi politik yang sedang berjalan adalah demokrasi. Bagi Salafisme, demokrasi wajah lain dari sekulerisme, yang *harâm* dan *kufir*.

Pada satu sisi, doktrin apolitik Salafisme didasarkan kepada kewajiban taat kepada pemimpin yang berkuasa. Sementara pada sisi lain, doktrin apolitik ini didasarkan kepada konsep; selama pemimpin itu masih beriman, meskipun ia berlaku tidak adil, dan bahkan memimpin negara demokrasi, maka ia harus disikapi dengan sabar, bukan dengan perlawanan. Dengan demikian melawan pemimpin yang berkuasa adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Namun ketika Revolusi pecah hingga pemerintahan Husni Mubarak berakhir, Salafisme secara bertahap turut berperan bersama kelompok-kelompok revolusi. Salafisme Mesir bahkan akhirnya memilih berpolitik praktis dengan membentuk partai-partai politik dan mengikuti serangkaian proses demokrasi.

Satu partainya yang bernama partai An-Nur mampu memenangkan urutan kedua di Parlemen. Jumlah kursi yang diraih hingga 25%. Sementara partai Salafisme lain tidak memiliki pengaruh sebagaimana partai An-Nur, namun mampu menjaga pilihan massa Salafisme. Keadaan ini pada akhirnya mengarahkan Salafisme Mesir sebagai kekuatan Islamis yang menyokong kemenangan calon dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, sebagai Presiden setelah Mubarak. Kemenangan Mursi bahkan menjadi proses paling demokratis dalam sejarah Mesir Modern.

Diskursus *maṣlahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan) menjadi landasan wacana Salafisme Mesir. Melalui diskursus ini, Salafisme Mesir berkeyakinan bahwa berpolitik praktis pada momentum tersebut adalah sah, karena bertujuan untuk menghalangi mafsadah yang lebih besar yang bakal muncul setelah Mubarak tumbang. Menghalangi *mafsadah* yang lebih besar itu menjadi lebih penting dari pada memegang prinsip keharaman berpolitik dalam sistem demokrasi. Pada gilirannya, Salafisme memandang prestasinya di Parlemen menjadi peluang yang lebih besar untuk menghalangi *mafsadah* yang lebih besar itu, sekaligus membuka pintu *maṣlahah*.

Seiring perkembangan politik, diskursus ini kemudian membawa Salafisme, baik faksi-faksi maupun partainya, kepada perubahan-perubahan. Ada perubahan internal yang terjadi. Perubahan terpenting diantaranya munculnya generasi Salafisme yang tajam politik, munculnya krisis figur yang meruntuhkan model sentralisasi figur yang diadopsi Salafisme selama ini, dan timbulnya perpecahan Salafisme Mesir sendiri. Partai An-Nur dan faksi Ad-Da'wah As-

Salafiyyah yang menaunginya, melalui diskursus masalah dan mafsadah, menentukan pilihan politik yang berbeda dari faksi-faksi Salafisme lainnya, yang juga menggunakan diskursus ini. Perpecahan ini akhirnya membawa Salafisme krisis bagi keberadaannya di Mesir. Salafisme pembela Mursi mulai meredup seiring kelairan kembali nuansa rezim lama. Sementara partai An-Nur dan faksi Ad-Da'wah As-Salafiyyah yang mendukung Abd Al-Fattah As-Sisi tetap berdiri di panggung politik dengan keadaan tertekan dan terhimpit.

Diskus *maṣlahah* dan *mafsadah* yang digunakan Salafisme mengarahkannya kepada perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun justru karena diskursus inilah Salafisme Mesir diterima keberlangsungan politiknya oleh negara, seperti yang terjadi kepada faksi Ad-Da'wah As-Salafiyyah dan partai An-Nur. Sedangkan disisi lain, diskursus ini mengarahkan Salafisme Mesir kepada status sebagai sasaran represi baru bagi negara, seperti yang terjadi kepada faksi-faksi dan partai-partai Salafisme yang menentang penggulingan Muhammad Mursi dari jabatan Presiden. Pada akhirnya transformasi Salafisme Mesir dalam konteks Musim Semi Arab yang sebenarnya sedang berorientasi kepada Pos-Islamisme memperlihatkan transformasi yang paradoks; tampil secara paradoks di panggung politik Mesir sebagaimana terjadi hingga saat ini.

B. Saran

Pembahasan mengenai transformasi Salafisme Mesir adalah satu dari sekian tema mengenai Salafisme Mesir setelah Revolusi 25 Januari. Uraian

penulis terhadap pembahasa tersebut juga sebagai salah satu dari sekian uraian-uraian yang ada diluar bahasa Indonesia. Meskipun penulis hanya menekankan satu bagian kecil saja dari pembahasa tersebut, hasil penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna.

Keterbatasan, terutama dalam sumber-sumber data, menjadikan hasil penelitian ini harus dilengkapi dengan penelitian lain. Kenyataan, semenjak Salafisme Mesir terjun ke panggung politik, keberadaannya akan selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik. Perubahan pada model sentralisasi Salafisme Mesir sendiri juga menghasilkan sedikit pemisahan antar figur-figur senior dengan tokoh-tokoh muda, juga sebagian massa pemudanya. Hal ini masih perlu diteliti lagi dengan terjun ke lapangan untuk menemukan jangkauan-jangkauan yang lebih dalam.

Penulis harap, ada penelitian-penelitian berikutnya yang melengkapi uraian penulis. Sungguh uraian dalam tesis ini masih perlu diperbaiki dan dilengkapi. Bila perlu penelitian-penelitian berikutnya bisa melengkapi uraian mengenai perkembangan Salafisme Mesir saat ini, dan dikaitkan dengan keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Salim, dan Amr Basyuni. *Mâ Ba'da As-Salafiyyah; Qirâ'ah Naqdiyyah fî Al -Khitâb As-Salafi Al-Mu'âşir*. Beirut: Namaa Center for Research and Studies. 2015.
- 'Amidi Al-, Ali ibn Muhammad. *Al-Iḥkâm fî Uṣūl Al-Aḥkâm*. Sayid Al-Jamili (Tahk.). Juz 3. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi. 1404 H..
- Amin, 'Usman. *Râ'id Al-Fikr Al-Miṣri Al-Imâm Muhammad 'Abduh*. Kairo: Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al-'Ammah li Al-Kitab. 2015.
- 'Aziz Al-, Shaleh ibn Abd. *At-Tamhîd li Syarḥ Kitâb At-Tauḥîd*. Juz 2. Riyad: Dar At-Tauhid. 2003.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Baijuri Al-, Al-Imam. *Tuḥfaḥ Al-Murîd 'Alâ Jauharah At -Tauḥîd*. Ali Jum'ah (tahk.). Kairo: Dar As-Salam. 2002.
- Bayat, Asef. *Foreword: Arab Revolt in Post-Islamism Times*, dalam *Popular Protest in the New Middle East Islamism and Post-Islamist Politics*. Are Knudsen dan Basem Ezbidi (eds.). London: I.B. Tauris. 2014.
- _____, Asef. *Pos-Islamisme*. Faiz Tajul Milah (terj). Yogyakarta: LKis. 2011.
- Burdah, Ibnu. *Menuju Dunia Arab Baru: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.
- Farid, Ahmad. *Assalafiyyah Qawa'id wa Ushul*. Iskandaria: Dar Al-Iman. 2015.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqâ'is al -Lughah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.

- Fauzan, Shalih ibn, *Al-Irsyâd ilâ Şahîh Al-I'tiqâd wa Ar-Radd 'Alâ Ahl As-Syirk wa Al-Ilhâd*. Cet ke-4. Riyad: Dar Ibn Al-Jauzi. 1999.
- Fayid, Ammar Ahmad. “*Assalafiyyûn min Syar’iyyah Al-Fatwâ ilâ Syar’iyyah Al-Intikhâb*”. Basyir Musa Nafi’ (eds.). *Ad-Zâhirah Assalafiyyah: Atta’addudiyyah At-Taẓîmiyyah wa As-Siyâsât*. Qatar: Markaz Al-Jazeera li Ad-Dirasat. 2014.
- Hafez, M., dan Quintan Wiktorowics. “*Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan dalam Gerakan Islam di Mesir*”. Quintan Wiktorowics (ed.). *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Nurul Agustina (terj.). Yogyakarta: Gading Publishing. 2012.
- Hammad, Maulay Umar ibn. *Ilm Uşûl At-Tafsîr: Muḥâwalah fî Al-Binâ*. Kairo: Dar As-Salam. 2010.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad; Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*. Ithaca. NY: Southeast Asia Program Publications. Southeast Asia Program. Cornell University. 2006.
- Hilmi, Musthafa. *Nizâm Al-Khilâfah fî Al-Fikr Al-Islâmi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah. 2004.
- Kunakata, Hasan. *An-Naẓariyyah As-Siyâsiyyah ‘Inda Ibn Taimiyah*. Damam: Dar Al-Akhilla. 1994.
- Lauziere, Henri. *The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century*. New York: Columbia Press University. 2016.
- Meijer, Roel. “*Muqaddimah*”, Roel Meijer (ed.). *As-Salafiyyah Al-‘Alamiyyah: Al-Ḥarakât As-Salafiyyah Al-Mu’âşirah fî ‘Alam Mutagayyir*. Muhammad Mahmud At-Tubah (terj.). Beirut: Arab Network for Research and Publishing. 2014.
- Muhajir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*. Cet ke-2. Yogyakarta: Rakesarasin. 2001.

- Nawar, Shalahudin Muhammad. *Naẓ ariyah Al-Khilâfah au Al-Imâmah wa Taṭ awwuruhâ As-Siyâsi wa Ad-Dîni* . Alexandria: Jalal Hizzi. 1996.
- Opp, Karl-Dieter. *Theories of Political Protest and Social Movements; A Multidisciplinary introduction, critique, and synthesis*. New York: Routledge. 2009.
- Qahthani Al-, Muhammad ibn Said. *Al-Walâ wa Al-Barâ fî Al-Islâm*. Cet ke-6. Makkah: Dar Thaybah. 1413 H.
- Razzaq Ar-, Abd. *Al-Qoul As-Sadîd fî Ar -Radd ‘Alâ Man Ankara Taqs î m At Tauhîd* . , Cet ke-3. Damam: Dar Ibn Al-Qayyim. 2001.
- Ritzer, George (ed.). *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage Publication. 2005. 2 Vol.
- Sevilla, Consuelo G. (Ed.). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Sharrock, Wes W. dkk.. *Understanding Modern Sociology*. London: Sage Publication. 2003.
- Syalathah, Ahmad Zaghlul. “*Mustaqbal At-Taḥ awwulât Dâ khila At-Tayyâr As-Salafî fi Miṣ r*”. Faras Khoirullah (ed.). *At-Taḥ awwulât As-Salafîyyah; Ad-Dilâlât, At-Tadâ’iyah wa Al-Afâq*. Jordania: Muassasah Freiderich Ebert. 2013.
- _____, Ahmad Zaghlul. *Al-Ḥâlah As-Salafîyyah Al-Mu’â ṣ irah fi Miṣ r*. Kairo: Maktabah Madbouli. 2016.
- Taimiyah, Ibn. *Minhâj As-Sunnah*. Muhammad Rasyad Salim (Tahk.). Juz 1. Riyad: Univ. Al-Imam Muhammad ibn Su’ud Al-Islamiyyah. 1986.
- Tarrow, Sidney G. *Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics*. Cet ke- 3. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.

Turtusi At-, Abu Basir. *Hukm Al-Islâm f Ad -Dimuqrâṭ iyyah wa At-Ta'addudiyah Al-Hizbiyyah*. Cet ke-2. London: Al-Markaz Ad-Dauli li Ad-Dirasat Al-Islamiyyah. 2000.

Uwais, Mansur Muhammad Muhammad. *Ibn Taimiyah Laisa Salafiyyan*. Kairo: Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah. 1970.

Wiktorowicz, Quintan. "Anatomy of the Salafi Movement", *Jurnal Studies in Conflict and Terrorism*. Routledge. 2006.

Yoyo, *Pemikiran Arab: Dinamika Intelektual, Ideologi dan Gerakan*. Yogyakarta: Sociality. 2017.

Jurnal, Paper dan Majalah

Ahyar, Muzayyin. "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam". *Jurnal Walisongo*. Vol. 23, No. 1. Mei 2015.

'Ardawi Al-, Khalid 'Ulaiwi. "Ar-Rabī Al -'Arabi: Šaurât lam Taktamil." Paper disampaikan dalam Seminar *Tantangan-tantangan pasca Diktatorisme Negara-negara Arab di Universitas Karbala*, 2013.

Ardiansyah, "Pengaruh Madzhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol 2, No. 2. 2013.

Bayat, Asef. "What Is Pos-Islamism?". *ISIM Review*. Auntnum 2005.

Brown, Jonathan. *Salafis and Sufis In Egypt*. Washington D.C.: Carnegie Endowment 2011.

Brown, Nathan J.. *Islamic Politics in the New Egypt*. Washington D.C.: Carnegie Endowment 2013.

Dustūr Jumhūriyyah MiṢ r Al-'Arabiyyah, ketetapan Nopember 2012.

Hanafi, Sari. "As-Salafiyyah wa As-Salafiyyūn Al-Judud". *Majalah Omran*. Vol. 19. 2017.

- Hasan, Noorhaidi. The Failure of Wahhabi Campaign: The Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia. *Jurnal South East Asia Research*. Vol. 18. No. 4. Desember 2010.
- Heffelfinger, Chris. "Trends in Egyptian Salafi Activism", *The Combating Terrorism Center*. New York 2007.
- Huda, Sokhi. "Global Salafism: Perspektif Baru tentang Keunikan Radikalisme Islam". *Jurnal Kontemplasi*. Vol. 8, Nomor 2. Nopember 2011.
- Lauziere, Henri. The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism From The Perspective Of Conceptual History, *Jurnal Middle East Studies*. 42. 2010.
- Makhasin, Luthfi. "Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 19, No. 3. Maret 2016.
- McTighe, Kristen. "The Salafi Nour Party in Egypt". Al-Jazeera Center for Studies. Maret 2014.
- Pichardo, Nelson A.. "Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations". *The Sociological Quarterly*. Vol. 29, No. 1. Spring 1988.
- Sherif El-, Ashraf. *Egypt's Salafists at a Crossroads*. Washington DC.: Carnegie Endowment for International Peace. 2015. 3 Bag.
- Sunarwoto. Salafi Dakwah Radio: A Contest for Religious Authority. *Archipel*. 91. Paris. 2016.
- Syalathah, Ahmad Zaghlul. "Ad-Da'wah As-Salafiyah As-Sakandariyyah: Masarat At-Tandzim wa Ma'alat As-Siyasah". *Jurnal Mustaqbal Al-'Arabi*. Vol. 443. Januari 2016.

Yaldrim, Ramadan. “Assalafiyyah Min Ba’d Ar-Rabī’ Al-‘Arabi: Miṣr Anmūzajan”. *Jurnal Al-Ilahiyyat Al-Akadimiyyah*. Vol. 1. Februari 2015.

Website

Lacroix, Stephan. “Miṣr: As-Salafiyyūn Al-Bragmatiyyūn.” <http://www.carnegie-mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984>. Diakses 15 Desember 2017).

<http://www.dorar.net/article/1823> (diakses 5 Juli 2018).

Utaibi Al-, Khalid. “As-Salafiyyah: Haqīqatuhâ wa Ṣilatuhâ bi Ad-Daulah As-Su’ūdiyyah.” <http://www.platform.almanhal.com/Reader/Article/65157>. Diakses 4 Agustus 2018.

<http://www.ansaralsonna.com/web/pageother-659.html>. Diakses 3 April 2018.

http://www.m.marefa.org/قرارات_سبتمبر_السوداء_1981. Diakses 7 Agustus 2018.

<https://www.saaaid.net/Doat/ehsan/146.htm>. Diakses 16 Juni 2018.

Al-Humaidi, Khalid. “Baḥān Al-Adillah ‘aḥ Anna Hurmah Al-Khurūj ‘aḥ Wulātil amr min i’lāh Ahl As-Sunnah wa Al-Jamā’ah”. <http://www.k-alhumaidi.com/book/khroj.pdf>. Diakses 28 Agustus 2018.

Syahhat, Abd Al-Mun’in. “As-Siyâsah Munzalaq Al-Islâmiyyî n ilâ Al-‘Unf.” <http://www.anasalafy.com/play.php?catsmaktba=18356>. Diakses 15 Juli 2018.

Olidort, Jacob. “Egypt’s Evolving Salafī Bloc: Puritanism and Pragmatism in Unstable Region.” <http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-evolving-salafi-bloc-puritanism-and-pragmatism-in-an-unstable-region>. Diakses 1 September 2018.

<http://www.alharakahalsalafiah.blogspot.com>. Diakses 29 Agustus 2018.

<http://www.almarakby.com/web/play-538.html>. Diakses 1 Juli 2018.

<http://www.islamist-movements.com/28681>. Diakses 20 Agustus 2018.

http://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Salafists_and_Politics_in_Egypt.aspx. Diakses 27 Agustus 2018.

<http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=45328>. Diakses 23 Agustus 2018.

<http://www.islamist-movements.com/28681>. Diakses 20 Agustus 2018.

<http://www.salafvoice.com/article.aspx?a=2534>. Diakses 6 Juli 2018.

http://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Egyptian_Political_Parties_and_Parliamentary_Elections_20112012.aspx. Diakses 25 Agustus 2018.

http://www.mubasher.aljazeera.net/news/2_انتخابات_برلمان_الثورة_المصري. Diakses 12 September 2018.

<http://www.archive.org/web/20110812154347/http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=457766>. Diakses 13 Agustus 2018.

<http://www.alittihad.ae/WejhatArticle/65974/>. Diakses 16 Agustus 2018.

<http://www.m.youm7.com/story/2013/7/20/النور-بيان-يكشف-خطايا-الإخوان-خلال-فترة-الحكم-مرسى-بيان-داخلي-> Diakses 21 Agustus 2018.

<http://www.youtube.com/watch?v=Vg8VKLqi3gE>. Diakses 15 September 2018.

<http://www.youtube.com/watch?v=hoePClVILN4>. Diakses 15 September 2018.

<http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=42027>. Diakses 26 Agustus 2018.

<http://www.elhiwardz.com/featured/2727/>. Diakses 1 September 2018.

<http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/08/13/دعية-سلفي-من-يشكك-في-دعوة-مرسى-يشكك-في-ربنا>.html. Diakses 1 September 2018.

<http://www.christian-dogma/t1440478>. Diakses 1 September 2018.

<http://www.anasalfy.com/play.php?catsmktba=54010>. Diakses 5 September 2018.

<http://www.gate.ahram.org.eg/News/447238.aspx2014>. Diakses 8 Agustus 2018.

<http://www.almoslim.net/node/198580>. Diakses 10 Agustus 2018.

<http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/8/8/> بيان-العلماء-السعوديين-حول-احداث-مصر
Diakses 12 Agustus 2018.

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/4/16/> معارك-السلفيين-في-
المشهد-المصري . Diakses 3 September 2018.

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/3/3/> سلفية-واخوانية-ام-احزاب-
سياسية . Diakses 20 Agustus 2018.